

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Usaha peningkatan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab pendidikan, baik formal maupun non formal . Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk mempersiapkan atau membekali sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap dan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Secara operasional, implementasi dari hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Seiring dengan semangat undang – undang tersebut pendidikan muncul dan berkembang pesat, berdirinya lembaga – lembaga pendidikan yang mengatas namakan memajukan kehidupan bangsa, akan tetapi berdirinya pembangunan tersebut tidak di imbangi dengan tanggungjawab peningkatan mutu pendidikan. Padahal seyogyanya pendidikan itu seperti yang termaktub dalam undang-undang pendidikan nasional, yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Begitu pula yang tertera dalam tujuan pendidikan nasional menyatakan bahwa: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman, dengan demikian bahwa tugas mulia dari pendidikan tidak bisa dilakukan begitu saja.

Pendidikan mengandung pilihan bagi arah perkembangan murid-murid ke mana akan diarahkan, dan pengarahannya itu sudah tentu berkaitan erat dengan nilai-nilai. Pilihan terhadap suatu tujuan mengandung unsur mengutamakan terhadap beberapa nilai atas yang lainnya. Nilai-nilai yang dipilih sebagai pengarah dalam merumuskan tujuan pendidikan tersebut pada akhirnya akan menentukan corak masyarakat yang akan dibina melalui pendidikan itu (Al Syaibani 1979: 403). Dari berbagai uraian di atas, nampak bahwa tujuan pendidikan sangat penting untuk dirumuskan, sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan sedemikian rupa pendidikan yang telah berlangsung seperti yang telah disampaikan dalam undang-undang pendidikan nasional bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas juga dari campur tangan pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 11 dan 16, sekolah dapat dikategorikan kedalam 3 tingkat yaitu:

1. Sekolah Formal Standar/Sekolah Potensial, Sekolah Formal Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
2. Sekolah Formal Standar/Sekolah Potensial adalah sekolah yang masih relatif banyak kekurangan atau kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Sekolah Formal Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
4. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang telah memenuhi bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan dan memiliki kekhususan yang berkaitan dengan sekolah Internasional.

Semangat pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan didorong dengan munculnya permendiknas no 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu

pendidikan, yang dalam hal ini pelaksanaan atau implementasinya melalui evaluasi diri sekolah (EDS) yang berperan sebagai control terhadap keberlangsungan suatu lembaga pendidikan terutama dalam peningkatan mutu pendidikan.

Masalah mutu dalam dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan dirasakan oleh para siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan para stakeholders pendidikan (ihak-ihak yang menaruh perhatian terhadap pendidikan)" Mutu pendidikan menurut Sallis dalam Hadis dan Nurhayatin (2010; 66) merupakan perbaikan menyeluruh dari segi akademis maupun dari segi manajemen.

Keseluruhan komponen seperti mutu guru, proses pembelajaran, hasil belajar, dukungan orang tua dan masyarakat, sumber belajar dan penerapan teknologi adalah sebagian hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jika salah satu komponen tersebut buruk maka pengaruhnya terhadap komponen lain akan terlihat jelas baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila sekolah terbiasa melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), dan instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dengan demikian, SPMP, yang diimplementasikan dalam kegiatan EDS, akan menjadi komponen utama sebagai upaya membudayakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh sekolah sebagai bahan rencana pengembangan sekolah atau rencana kegiatan sekolah berdasarkan keadaan nyata atau kebutuhan sekolah tersebut. Standar Nasional yang menjadi acuan dalam Evaluasi Diri Sekolah (EDS) memiliki 8 standar yaitu : Standar Sarana dan Prasarana, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar pembiayaan. Dengan kata lain EDS adalah sebuah alat untuk mengontrol ke dalam dan keluar. Dua fungsi EDS ini mampu meningkatkan Mutu Pendidikan di lembaga masing – masing, namun juga dengan adanya laporan yang kongkrit dari lembaga pendidikan berkenaan dengan

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) terhadap pemerintah. Pemerintah daerah yang terkait juga dengan selaras dapat memberikan fungsi control yang baik serta memberikan dukungan dalam perbaikan sarana prasarana dan lain – lain serta mampu memberikan pelatihan – pelatihan dengan program – program peningkatan mutu guru. Dengan demikian EDS juga lebih jauh lagi mampu mampu meningkatkan kinerja guru dan peningkatan mutu pembelajaran. Dua hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Berbicara mengenai pentingnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu guru tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki intress yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah – kaidah profesionalisme guru yang di persyaratkan.

Dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di era Globalisasi profesionalisme guru menjadi hal yang sangat penting. Kemajuan pendidikan menandakan kemajuan peradaban bangsa

Kinerja guru merupakan bagian dari Profesionalisme penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Pendidikan dinyatakan berkualitas tinggi apabila guru mengacu pada visi dan misi, tujuan, sasaran, target pendidikan yang disusun untuk menjawab berbagai perubahan dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan.

Tingginya kinerja guru adalah dapat dibuktikan dengan kewenangan dan tanggung jawab kerja terhadap proses pembelajaran yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan pengelolaan iklim atau budaya sekolah.

Untuk itu proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan peningkatan kinerja guru. Peningkatan kinerja guru berakibat pula pada peningkatan kualitas mutu pembelajaran.

Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh

pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Hal ini menyangkut kurikulum, metode, media pengajaran, materi pengajaran, kualitas pengajar, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta system pengajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan. Dengan demikian perlu dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek dalam belajar. Pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau pengajar yang hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan harus berpusat pada peserta didik sebagai pusat belajar dengan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bersikap kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Wilayah tangerang selatan merupakan wilayah yang tergolong relatif muda, dimana wilayah atau daerah tersebut merupakan pemekaran dari wilayah kotaTangerang. Namun kemajuan pendidikan di wilayah tersebut boleh dikatakan cukup pesat. Berdirinya lembaga – lembaga pendidikan yang berkopeten di beberapa wilayah mampu memberi warna dan corak dalam persaingan lembaga pendidikan dan sekaligus mendorong dalam pencapaian penjaminan mutu pendidikan yang terbaik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang di lakukan oleh LPMP provinsi banten dapat dilihat berdasarkan beberapa informasi dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1.1

Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) LPMP Provinsi Banten Tahun 2013

PROVINSI	:	BANTEN
KABUPATEN/KOTA	:	KOTA TANGERANG SELATAN
NO	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH
1	SD	231
2	SMP	74
3	SMA	40
4	SMK	19

Data sekolah dasar yang telah melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dari tabel di atas, kota tangerang selatan memiliki 231 sekolah dasar, hal ini

menandakan pula bahwa sekolah – sekolah tersebut mempunyai atau telah terakreditasi oleh pemerintah siap dan mampu untuk membawa dan bersaing dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan sampai jaman mulai tenggelam..

Dilihat dari skor pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), untuk jenjang sekolah dasar sebagai berikut:

Tabel 1.2
Skor Pemenuhan SNP Provinsi Banten
Tahun 2013

NO	STANDAR	SKOR PEMENUHAN SNP	
		KAB/KOTA	PROVINSI
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.96	4.73
2	STANDAR ISI	5.97	5.89
3	STANDAR PROSES	6.06	5.78
4	STANDAR PENILAIAN	6.93	6.81
5	STANDAR PTK	7.16	6.95
6	STANDAR PENGELOLAAN	7.07	7.01
	RATA-RATA SNP	6.28	6.11

Kalau kita melihat tabel diatas diketahui bahwa skor SNP tiap standar menunjukkan nilai yang bervariasi diantaranya :Standar Mutu Lulusan di kabupaten/Kota 4,96 provinsi 4,73 ; Standar Isi kabupaten/kota 5,97 provinsi 5,89; Standar Proses kabupaten/kota 6,06 provinsi 5,78 ; Standar Penilaian kabupaten/kota 6,93 provinsi 6,81 ; Standar PTK Kabupaten/ Kota 7,16 Provinsi 6,95; Standar Pengelolaan Kabupaten/ Kota 7,07 Provinsi 7,01 Jadi rata – rata SNP sekolah dasar di provinsi banten adalah 6,11 sedangkan di kabupaten/kota 6,28.Melihat hal demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat poin – poin yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terutama dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan terutama pada standar mutu lulusan, standar proses, standar penilaian sedangkan pada standar tenaga pendidik dan kependidikan cukup tinggi.

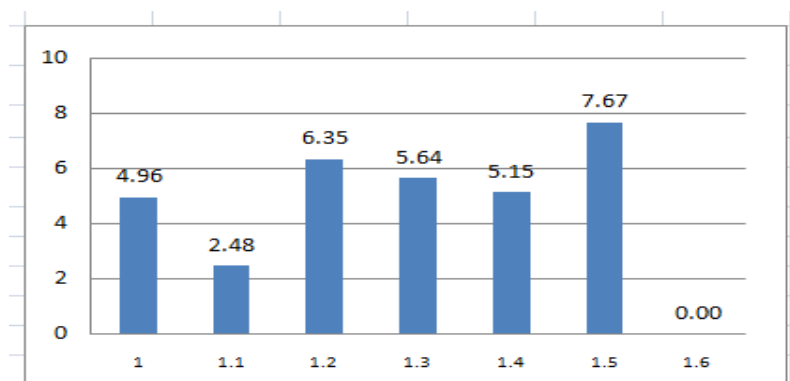
Grafik skor standar isi yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum disetiap sekolah menunjukkan bahwa indikator dari standar isi tersebut masih memerlukan perbaikan – perbaikan atau evaluasi yang mendalam terutama pada indikator pelaksanaan kurikulum relevan dengan lingkungan dan indikator yang menyatakan revisi kurikulum dilakukan secara berkala juga menunjukkan skor relative kecil.

Begitu pula jika kita melihat kepada hasil dari standar proses pada grafik dan agregasi di bawah ini dapat pula kita menyimpulkan lagi bahwa standar prosespun masih perlu menjadi perhatian yang mendalam, sehingga semua aspek standar nasional pendidikan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 1.3

Skor Kompetensi Lulusan Provinsi Banten Tahun 2013

NO	STANDAR DAN INDIKATOR	SKOR	
		KAB/KOTA	PROVINSI
1	SKL	4.96	4.73
1.1	Prestasi siswa/lulusan	2.48	2.07
1.2	Lulusan menunjukkan karakter	6.35	6.36
1.3	Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis	5.64	5.37
1.4	Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun	5.15	4.98
1.5	Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan	7.67	7.55
1.6	Lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif	0.00	0.00



Gambar 1.1

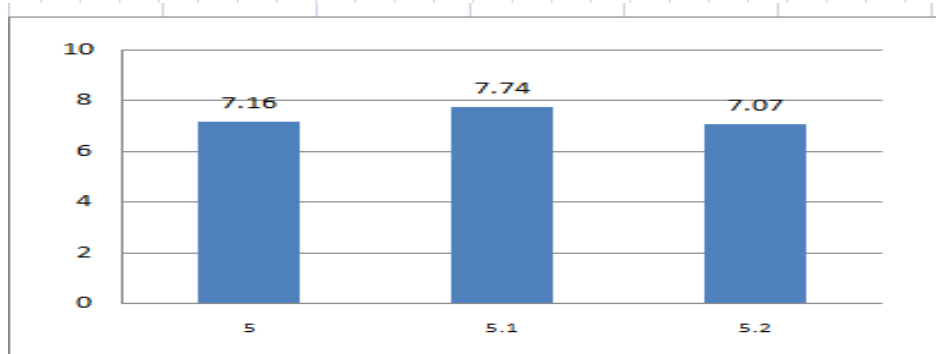
Skor Standar Proses Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) LPMP Provinsi Banten Tahun 2013

Menyoroti Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari hasil Evaluasi Diri Sekolah yang dilakukan oleh LPML Provinsi Banten Justru menunjukkan hal yang berbeda, standar PTK di wilayah provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tangerang Selatan menunjukkan hal yang positif.

Tabel 1.4

Skor Standar PTK Provinsi Banten Tahun 2013

NO	STANDAR DAN INDIKATOR	SKOR SNP	
		KAB/KOTA	PROVINSI
5	STANDAR PTK	7.16	6.95
5.1	Guru dan tenaga pendidikan profesional dalam	7.74	7.52
5.2	Peningkatan kompetensi PTK dilakukan untuk	7.07	7.01



Gambar 1.2

Standar PTK Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) PMP Provinsi Banten Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengharuskan bahwa guru profesional memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik, sehingga jika melihat grafik skor dan agregasi standar PTK sekolah – sekolah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Tangerang Selatan sudah mendekati standar peraturan pemerintah. Dari beberapa paparan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan EDS di setiap sekolah – sekolah mampu dilakukan dengan baik, sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran SNP di sekolah – sekolah wilayah provinsi atau kabupaten kota, dan menjadikan input bagi pemerintah daerah khususnya untuk melakukan monitoring dan bimbingan atau pendampingan bagi sekolah – sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Lebih jauh lagi berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas kecamatan pondok aren ,mengatakan bahwa lembaga – lembaga pendidikan di wilayah tangerang selatan sudah menerapkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dari tahun 2011,termasuk pula wilayah kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

Berikut adalah hasil dari rekapitulasi laporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dari beberapa sekolah yang berada di wilayah kelurahan Pondok Aren gugus 4 dan 6 kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan dapat dijadikan acuan dalam menemukan permasalahan yang terjadi setelah penerapan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) tersebut.

Tabel 1. 5

REKAPITULASI LAPORAN EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)																																	
SEKOLAH DASAR KELURAHAN PONDOK AREN TANGERANG SELATAN																																	
GUGUS 4 TAHUN 2012																																	
NO	NAMA SEKOLAH DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) / STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)																															
		STANDAR ISI				STANDAR PROSES				STANDAR KOMPETENSI LULUSAN				STANDAR KOMP PEND & TENAGA KEPEND				STANDAR SARPRAS				STANDAR PENGELOLAAN				STANDAR PEMBIAYAAN				STANDAR PENILAIAN			
		RATA-RATA TAHAPAN PENGEMBANGAN																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SDN PONDOK AREN 01		√				√				√				√				√				√				√						
2	SDN PONDOK AREN 02		√				√				√				√				√				√				√						
3	SDN PONDOK AREN 03		√				√				√				√				√				√				√						
4	SDN PONDOK AREN 04		√				√				√				√				√				√				√						
5	SDN PONDOK AREN 05		√				√				√				√				√				√				√						
6	SDN PONDOK PUCUNG 01		√				√				√				√				√				√				√						
7	SDN PONDOK PUCUNG 02		√				√				√				√				√				√				√						
8	SDN PONDOK PUCUNG 03		√				√				√				√				√				√				√						
9	SDN PONDOK PUCUNG 04		√				√				√				√				√				√				√						
10	SDN JURANG MANGU TIMUR 02			√			√				√				√				√				√				√						
11	SDS AN-NISAA			√			√				√				√				√				√				√						
12	SDS BUDI LUHUR			√			√				√				√				√				√				√						
13	SDS AL MUBARAK			√			√				√				√				√				√				√						
14	SD ISLAM AMALINA			√			√				√				√				√				√				√						
15	SDIP DARUSALLAM			√			√				√				√				√				√				√						
16	SDS NURUL BADRIYAH			√			√				√				√				√				√				√						
17	SDS FADILAH			√			√				√				√				√				√				√						
18	SDIT CORDOVA			√			√				√				√				√				√				√						
19	SDS AL AZHAR SHIFA BUDI			√			√				√				√				√				√				√						
20	SDS DAHLIA			√			√				√				√				√				√				√						

Dari hasil rekapitulasi pelaporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di atas dapat kita amati bahwa pelaksanaan EDS di lapangan sudah tersosialisasi dengan cukup baik, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan sekolah. Perkembangan sekolah swasta memang mendominasi kemajuan yang cukup pesat, implementasi EDS menjadi salah satu acuan dan tolok ukur pembuatan rencana kerja sekolah (RKS) dalam meningkatkan potensi dan perkembangan sekolah. Dalam pembuatan atau penyusunan RKS di beberapa sekolah dasar negeri dilakukan berdasarkan diskusi gugus, sedangkan untuk sekolah swasta dilakukan oleh tim pengembang sekolah (TPS) masing-masing. Berdasarkan temuan di atas maka dapat diperoreh indentifikasi masalah sebagai berikut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut diantaranya:

1. Apakah Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dapat di jadikan gambaran perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) pada tahun yang akan datang ?
2. Apakah terdapat hubungan antara Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan Peningkatan Kinerja Guru ?
3. Apakah terdapat hubungan antara Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mutu pembelajaran ?
4. Apakah terdapat hubungan antara evaluasi diri sekolah dan program – program peningkatan mutu guru terhadap kinerja guru dan mutu pembelajaran ?

C. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan yang mendorong perlunya dilakukan suatu penelitian, dimana permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan EDS di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
2. Bagaimana gambaran kinerja guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
3. Bagaimana gambaran mutu pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
4. Bagaimana gambaran program peningkatan mutu guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
5. Bagaimana hubungan EDS dengan program peningkatan mutu guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
6. Bagaimana hubungan EDS dengan kinerja guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
7. Bagaimana hubungan EDS dengan mutu proses pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
8. Bagaimana hubungan Program Peningkatan Mutu Guru dengan Kinerja Guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
9. Bagaimana hubungan Program Peningkatan Mutu Guru dengan mutu proses pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?
10. Bagaimana hubungan Kinerja Guru dengan mutu proses pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan EDS di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
2. Mengetahui gambaran kinerja guru yang dilaksanakan di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
3. Mengetahui gambaran mutu pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
4. Mengetahui gambaran program peningkatan mutu guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan

5. Mengetahui hubungan EDS dengan Program Peningkatan Mutu Guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
6. Mengetahui hubungan EDS dengan kineja guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
7. Mengetahui hubungan EDS dengan Mutu Pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
8. Mengetahui hubungan Program peningkatan Mutu Guru dengan Kinerja Guru di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
9. Mengetahui hubungan Program Peningkatan Mutu Guru dengan Mutu Pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan
10. Mengetahui hubungan Kinerja Guru dengan Mutu Pembelajaran di sekolah dasar wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi bagi upaya – upaya yang mendorong terwujudnya peningkatan kinerja guru yang tinggi dan mutu pembelajaran yang efektif dan berkualitas melalui program Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, terutama dengan:

1. Upaya peningkatan dan wawasan kinerja guru dalam proses penjaminan mutu pendidikan.
2. Sebagai masukan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan guru dalam mengimplementasikan mutu pembelajaran sebagai wujud evaluasi diri dalam program peningkatan mutu pendidikan serta program yang berkelanjutan.
3. Sebagai masukan secara teoritis atau bahan rujukan bagi yang berminat untuk meneliti tentang Evaluasi Diri Sekolah dalam kaitannya dengan kinerja guru dan mutu pembelajaran.

F. Sistematika

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan HIPOTESIS PENELITIAN

- A. Kajian Pustaka
- B. Kerangka Penelitian
- C. Hipotesis Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Lokasi dan Subjek Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Metoda dan Pendekatan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Instrumen Penelitian
- F. Pengembangan Instrumen
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

